



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN



DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta No. 62 Kota Kebumen Telp. 0287-381988





BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, telah dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025.**

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	I
DAFTAR TABEL.....	Iii
KATA PENGANTAR.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
LALU.....	9
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	
Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	
tahun lalu.....	9
2. Pencapaian target Renstra Perangkat Daerah	
berdasarkan realisasi program dan kegiatan	
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun	
sebelumnya	9
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
1. Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja	
Utama Perangkat Daerah.....	18
2. Capaian Indikator Kinerja Utaman Daerah dan	
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	18
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi	
Perangkat Daerah.....	20
1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal	
kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah	
.....	20
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam	
menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat	
Daerah.....	21
3. Dampak pencapaian visi dan misi kepala daerah,	
terhadap capaian program nasional/internasional,	
seperti Standar Pelayanan Minimal dan SDGs.....	23
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan	
pelayanan Perangkat Daerah.	23
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan	
catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam	
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang	
direncanakan.....	25
D. Review Review Terhadap Rancangan Awal	
RKPD.....	27

1.	Perbandingan antara rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan (penetapan RKPD)	27
2.	Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.....	37
3.	Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.....	39
E.	Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	41
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	45
A.	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	45
B.	Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	47
C.	Program Dan Kegiatan.....	49
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	52
BAB V	PENUTUP.....	65
A.	Catatan Penting.....	65
B.	Kaidah Pelaksanaan.....	65
C.	Rencana Tindak Lanjut.....	66

LAMPIRAN :

- Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2024.....	9
Tabel. 2.3 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	10
Tabel. 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Kebumen.....	19
Tabel. 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.....	22
Tabel. 2.6 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kebumen.....	29
Tabel. 2.7 Usulan Pokok Pikiran (POKIR) Tahun 2025 dan setelah perubahan Disparbud Kabupaten Kebumen.....	41
Tabel. 3.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan setelah Perubahan Disparbud Kabupaten Kebumen Tahun 2025.....	49
Tabel. 4.1 Kerangka Pendanaan Program,Kegiatan,Subkegiatan Setelah Perubahan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Disparbud Kabupaten Kebumen.....	53

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 ini merupakan tindak lanjut dari penyesuaian terhadap perubahan arah kebijakan pembangunan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta dinamika kebutuhan pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Kebumen. Renja Perubahan ini juga mengacu pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), serta mendukung proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025.

Renja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 memuat penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Pada tahun anggaran 2025, terdapat 6 program, 14 kegiatan, dan 33 subkegiatan dengan total pagu anggaran sebesar 16.932.306.900,-. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran pembangunan bidang pariwisata dan kebudayaan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga Renja Perubahan Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 26 Juni 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Krma Karmila, S.Sar, M.Eng	
Dyah Mushka P. ST. M. Ling	


Drs. FRANS HAIDAR MPA
Pembina Utama Muda
NIP. 19681229 199009 1 001

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terbentuknya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen didasarkan pada **Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021** tentang Perubahan atas **Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memenuhi aspirasi masyarakat, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun **Rencana Kerja (Renja)** tahunan, yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, serta indikator kinerja dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas selama satu tahun ke depan.

Renja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disusun sebagai tindak lanjut atas perubahan kebijakan pembangunan daerah, hasil evaluasi capaian kinerja, serta adanya penyesuaian kebutuhan dan prioritas pembangunan yang berkembang di bidang kepariwisataan dan kebudayaan. Penyusunan Renja Perubahan ini juga mengacu pada dokumen **RKPD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025**, **Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021–2026**, serta sebagai dasar dalam penyusunan **RAPBD Perubahan Tahun 2025**.

Proses penyusunan Renja Perubahan dilakukan secara sistematis dan partisipatif, melalui beberapa tahapan, antara lain:

- **Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah**, terdiri dari pejabat dan staf teknis yang memiliki kompetensi dan ketersediaan waktu untuk mendukung proses penyusunan dokumen secara optimal;
- **Orientasi Tim Penyusun**, untuk menyamakan persepsi terkait teknis penyusunan Renja, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, serta memahami regulasi perencanaan dan penganggaran daerah;
- **Penyusunan Agenda Kerja**, sebagai pedoman pelaksanaan tahapan kegiatan penyusunan hingga penetapan dokumen;
- **Pengumpulan dan Analisis Data**, melalui identifikasi kebutuhan informasi, kompilasi data dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, dan penyusunan matriks sebagai dasar analisis kebijakan.

Mengacu pada **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap daerah diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu, dan responsif terhadap dinamika perubahan. Perencanaan dilakukan secara berjenjang melalui dokumen **RPJPD**, **RPJMD**, dan **RKPD**, yang selanjutnya dijabarkan dalam **Renja Perangkat Daerah**. Renja menjadi dasar dalam penyusunan **KUA**, **PPAS**, serta **RAPBD**.

Renja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan hasil **Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)**, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten, guna menjamin terakomodasinya aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan secara terpadu.

Tema pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 yaitu *“Peningkatan sektor pertanian, industri, dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia”*, dengan lima prioritas pembangunan tahun 2025 sebagai berikut: Mewujudkan sumber daya manusia yang berwawasan luas, berdaya saing, dan berkemajuan melalui pendidikan yang berkualitas;

- a. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis agroindustri;
- b. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan potensi pariwisata dan kearifan lokal;
- c. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Sejalan dengan visi pembangunan daerah tahun 2021–2026 dan arah kebijakan nasional serta provinsi, perencanaan pembangunan daerah termasuk Renja Perubahan ini juga diharapkan dapat menjaga kesinambungan pembangunan dari pusat ke daerah. Selain itu, proses perencanaan dilakukan secara kolaboratif bersama para pemangku kepentingan, dengan memperhatikan rencana tata ruang, kondisi eksisting daerah, potensi lokal, serta kapasitas fiskal daerah.

Renja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan isu-isu strategis, program prioritas, kegiatan dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerja yang akan dilaksanakan. Dokumen ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, serta sebagai alat kendali dan evaluasi kinerja tahunan melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Dengan adanya dokumen Renja Perubahan ini, diharapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan di sektor pariwisata dan kebudayaan secara adaptif dan efektif, serta mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Disparbud tahun 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170) ;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182) ;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
 24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini adalah untuk:

- a. Sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2025;
- b. Sebagai alat ukur penetapan kinerja/kegiatan dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen pada Perubahan Anggaran 2025.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah:

- a. Merumuskan perencanaan Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen yang terarah dan terukur;
- b. Menjamin keterikatan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- c. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan;
- d. Untuk menetapkan kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dalam waktu kurun 1 (satu) tahun;
- e. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Kepala Dinas selanjutnya.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Disparbud tahun 2025 disusun dengan sistematika sesuai Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

B. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun 2024) berdasarkan data LKPJ/LPPD/LKjIP
2. Capaian tahun 2024, mengacu pada APBD tahun 2024.
3. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal, dan/atau Indikator Kinerja Kunci (diambil dari Indikator Kinerja Utaman Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah)
2. Capaian kinerja urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah (opsional bagi Perangkat Daerah yang memiliki kinerja urusan dengan mengambil data pada Narasi RKPD Tahun 2025).

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti Standar Pelayanan Minimal dan SDGs;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

1. Perbandingan antara rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan (penetapan RKPD)
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal Renja Perangkat Daerah, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup di antaranya:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun terkait ketersediaan anggaran
2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan
3. Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA.

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun 2024)
Berikut adalah Indikator sasaran yang harus dicapai mengacu pada RPJMD 2021-2026 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen :
 - a. Indikator Capaian Pariwisata
Dengan Sasaran Meningkatnya kontribusi pendapatan Pariwisata Terhadap PAD dengan Indikator Kinerja Kontribusi Pendapatan Pariwisata terhadap PAD (%), Adapun rumus perhitungannya Jumlah pendapatan pariwisata dibagi Jumlah PAD, dikali 100%.
 - b. Indikator Capain Kebudayaan
Meningkatnya pembangunan kebudayaan diukur dengan indikator kinerja Persentase budaya yang dilestarikan. Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase budaya yang dilestarikan, dengan (persentase kesenian yang dikembangkan + persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan) : 2

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Sat	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			T.Akhir RPJMD 2026	% Capaianr hdp Target Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1	Kontribusi Pendapatan Pariwisata terhadap PAD	%	1,10	1,31	2,03	1,83	90,28	2,24	81,69
2	Persentase budaya yang dilestarikan	%	34,89	60,30	34,05	58,71	172,43	43,05	126,43

2. Pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya

Berdasarkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tidak dapat dipisahkan dari analisis evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya. Evaluasi ini merupakan bagian integral dan tidak dapat dipisahkan, mengingat rantai kebersinambungan (sustainability chain) RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 tidak akan terbentuk tanpa komponen tersebut. Oleh karena itu, evaluasi pencapaian kinerja ini ditampilkan dalam bentuk Tabel Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024 seperti berikut:

Tabel. 2.3
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU Rp.	REALISASI	
			Rp.	%
1	2	3	4	5 = 4/3
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.546.220.000	2.533.074.055	99,48
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	116.409.000	116.260.250	99,87
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	78.501.000	78.500.950	100
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	37.908.000	37.759.300	99,61
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.429.811.000	2.416.813.805	99,47
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2.304.216.000	2.292.646.805	99,5
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	125.595.000	124.167.000	98,86
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.494.719.960	1.470.143.910	98,36
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1.494.719.960	1.470.143.910	98,36
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	84.277.000	82.836.900	98,29
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	1.410.442.960	1.387.307.010	98,36
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.883.050.000	6.637.387.975	96,43
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.310.000	81.120.300	99,77
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.244.000	68.177.550	99,9
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.066.000	12.942.750	99,06
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.672.299.000	5.452.732.200	96,13
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.473.082.000	5.257.836.322	96,07
3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	199.217.000	194.895.878	97,83
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	370.000.000	362.758.995	98,04
3.26.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	370.000.000	362.758.995	98,04
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.692.000	213.356.372	99,84
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.400.000	30.399.000	100
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.950.000	52.893.672	99,89
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.500.000	55.484.500	99,97
3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	3.448.000	98,51
3.26.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	23.342.000	23.135.000	99,11

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU Rp.	REALISASI	
			Rp.	%
1	2	3	4	5 = 4/3
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.000.000	47.996.200	99,99
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105.000.000	99.730.000	94,98
3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	15.000.000	14.670.000	97,8
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000	85.060.000	94,51
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.642.000	288.212.578	95,87
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.982.400	99,12
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000	237.774.828	95,11
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.642.000	48.455.350	99,62
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.107.000	139.477.530	99,55
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.907.000	99.604.030	99,7
3.26.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	4.200.000	4.200.000	100
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	11.673.500	97,28
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.000.000	24.000.000	100
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6.725.227.040	6.546.329.085	97,34
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.127.108.040	1.125.188.670	99,83
3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.127.108.040	1.125.188.670	99,83
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.545.420.000	5.368.545.465	96,81
3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	88.081.000	83.615.800	94,93
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	880.407.000	851.844.630	96,76
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.576.932.000	4.433.085.035	96,86
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	52.699.000	52.594.950	99,8
3.26.02.2.04.0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	11.851.000	11.808.750	99,64
3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	40.848.000	40.786.200	99,85
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.028.931.000	2.003.003.918	98,72
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.028.931.000	2.003.003.918	98,72
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2.028.931.000	2.003.003.918	98,72
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	73.452.000	73.179.942	99,63
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	73.452.000	73.179.942	99,63
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	73.452.000	73.179.942	99,63
JUMLAH		19.751.600.000	19.263.118.885	97,53

Dari tabel diatas realiasasi anggaran s.d 31 Desember 2024 dapat disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan 6 (enam) program , 14 (empat belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) subkegiatan sebesar Rp. 19.751.600.000,- dapat terserap Rp. 19.263.118.885,- atau 97,53%.

Secara keseluruhan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Peningkatan kemudahan, kualitas, dan kuantitas pelayanan umum kepada pengunjung di obyek wisata. Peningkatan pengawasan terkait pendapatan di obyek wisata. Optimalisasi pengembangan Kerjasama pemerintah daerah dengan stakeholder. Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur terus di tingkatkan

Dan berikut capaian review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disparbud tahun 2024, dan realisasi Renstra Disparbud s.d Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 2.4 / Tabel T-C. 29 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Kebumen

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Target Realisasi %		Realisas capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8	11	12=(5+6+7+9+11)	13=(12/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Persentase Budaya yang Dilestarikan	43,04	20,82	34,89	60,30	29,82	58,71	196,88%	38,82	213,54	496,14%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kesenian yang Dikembangkan	53,13	70	42,86	44,44	34,38	41,27	120,04%	46,88	245,45	461,98%
4	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengembangan Kebudayaan Kebumen	65	70	33,33	44,57	39	76,15	195,27%	65	289,05	444,70%
5	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional	100	18	100	100	100	100	100,00%	100	418,00	418,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Target Realisasi %		Realisas capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8	11	12=(5+6+7+9+11)	13=(12/4)
6	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	32,97	3	26,92	76,15	25,27	76,15	301,35%	30,77	212,99	646,01%
7	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	39	2	26,92	60,30	25	76,15	304,60%	34	199,37	511,21%
8	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD (persen)	2,24	0,77	1,1	1,31	1,91	1,83	95,81%	2,11	7,12	317,86%
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100,00%	100	500,00	500,00%
11	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	30	4	6	6	6	6	100,00%	6	28,00	93,33%
12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	60	12	12	12	12	12	100,00%	12	60,00	100,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Target Realisasi %		Realisas capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8	11	12=(5+6+7+9+11)	13=(12/4)
13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan diklat dalam 1 tahun	1	0	1	1	1	0	0,00%	1	3,00	300,00%
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	72	12	12	12	12	100,00%	12	120,00	200,00%
15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	203	25	9	40	40	28	70,00%	23	125,00	61,58%
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	36	12	12	12	12	100,00%	12	84,00	140,00%
17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273	48	51	54	54	56	103,70%	57	266,00	97,44%
18	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata	90,26	9	82,77	88,72	84,64	86,86	102,62%	88,39	355,74	394,13%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Target Realisasi %		Realisas capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8	11	12=(5+6+7+9+11)	13=(12/4)
19	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	4	1	1	1	1	100,00%	1	8,00	800,00%
20	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana destinasi pariwisata yang dikelola	45	9	9	9	9	9	100,00%	9	45,00	100,00%
21	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Rekomendasi Jumlah TDUP yang diterbitkan terhadap TDUP yg diajukan	100	5	100	100	100	100	100,00%	100	405,00	405,00%
22	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	35	13,18	67,94	32,47	20	38,69	193,45%	33	185,28	529,37%
23	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara	7.000.965	966.941	1.623.865	2.151.109	1.300.160	2.983.422	229,47%	1.500.225	9225562,00	131,78%
24	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	20	1	20	25	20	20	100,00%	20	86,00	430,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Target Realisasi %		Realisas capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8	11	12=(5+6+7+9+11)	13=(12/4)
25	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	5	1	1	1	1	1	100,00%	1	5,00	100,00%

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa sebelumnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata berubah menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, dan tugas DISPARBUD atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe B, membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.

1. Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal, dan/atau Indikator Kinerja Kunci (diambil dari Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah)

Berikut Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 yakni :

1.1. Kebudayaan :

- Persentase budaya yang dilestarikan
- Persentase Kesenian yang Dikembangkan
- Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

1.2. Pariwisata :

- Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD (%)
- Jumlah kunjungan wisatawan (orang)
- Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata
- Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan
- Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar
- Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen menunjukkan kemajuan yang baik dalam pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas SDM, pelestarian budaya lokal, dan peningkatan kontribusi terhadap perekonomian daerah merupakan hasil nyata dari komitmen dan kerja keras seluruh pihak yang terlibat. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk pembangunan pariwisata dan kebudayaan yang berkelanjutan di masa depan. Berikut realisasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas pada tabel 2.5 / Tabel T-C.30

Tabel 2.5/ Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n- 3 2022	Tahun n- 2 2023	Tahun n-1 2024	Tahun n 2025	Tahun n+1 2026	Tahun n- 3 2022	Tahun n-2 2023	Tahun n-1 2024	Tahun n 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya pelestarian budaya		Persentase budaya yang dilestarikan (%)	25,05	29,82	34,05	38,82	43,05	34,89	60,30	58,71	38,82	43,05	IKU Daerah
2			Persentase Kesenian yg dikembangkan (%)	28,13	34,38	40,63	46,88	53,13	42,86	44,44	41,27	46,88	53,13	IKU OPD
3			Persentase Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan.	21,98	25,27	34,05	30,77	32,97	26,92	76,15	76,15	30,77	32,97	IKU OPD
5	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier		Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD (%)	1,9	1,91	2,03	2,11	2,24	1,1	1,31	1,83	2,11	2,24	IKU Daerah
4	Meningkatnya kunjungan wisatawan		Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	1.200.130	1.300.160	1.400.200	1.500.225	1.600.200	1.623.865	2.151.109	2.983.422	1.500.225	1.600.200	IKU OPD
6			Cakupan Pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU OPD
7			Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata (%)	82,77	84,64	86,52	88,39	90,26	82,77	88,72	86,86	88,39	90,26	IKU OPD
8			Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)	19	20	25	33	35	67,94	32,47	38,69%	33	35	IKU OPD
9			Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina (%)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	IKU OPD

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Isu Kritis yang Terkait

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen memegang peran strategis dalam pengembangan sektor pariwisata dan pelestarian budaya lokal. Perangkat daerah ini bertanggung jawab dalam mengelola potensi kepariwisataan dan kebudayaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan identitas dan kebanggaan lokal. Meskipun berbagai program telah dijalankan, kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi masih menghadapi sejumlah kendala yang memerlukan perhatian.

a. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- **Pelaksanaan Program dan Kegiatan**
Dinas telah melaksanakan sejumlah program seperti promosi destinasi wisata, pengembangan potensi budaya lokal, dan penyelenggaraan event kebudayaan. Namun demikian, efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar hasilnya lebih optimal dan menjangkau masyarakat secara luas.
- **Pengelolaan Destinasi Wisata**
Tingkat kinerja dalam pengelolaan destinasi tercermin dari kondisi infrastruktur dan aksesibilitas menuju lokasi wisata. Beberapa destinasi telah mengalami peningkatan, namun masih terdapat destinasi yang kurang fasilitas publik lainnya, yang berdampak pada kenyamanan dan minat kunjungan wisatawan.
- **Promosi dan Pemasaran Pariwisata**
Upaya promosi telah dilaksanakan melalui penyelenggaraan festival dan event budaya. Namun demikian, branding dan promosi destinasi wisata Kabupaten Kebumen belum optimal, khususnya dalam pemanfaatan media digital, platform daring, serta kemitraan strategis dengan pihak ketiga. Hal ini mempengaruhi tingkat visibilitas dan daya tarik wisata daerah di tingkat regional maupun nasional.
- **Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal**
Dinas telah melaksanakan program pelatihan, edukasi, serta kegiatan pelestarian budaya bersama masyarakat. Namun, partisipasi generasi muda masih kurang. Diperlukan pendekatan yang lebih inovatif dan berbasis teknologi agar nilai-nilai budaya dapat diterima dan dilestarikan oleh generasi milenial dan generasi Z.

b. Isu-Isu Kritis yang Memerlukan Perhatian Khusus

- **Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**
Kinerja pelayanan sangat dipengaruhi oleh kompetensi SDM. Saat ini, masih terdapat keterbatasan dalam hal kemampuan teknis dan manajerial, khususnya di bidang pengelolaan pariwisata dan kebudayaan modern. Diperlukan upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan, sertifikasi profesi, serta pengembangan SDM berbasis kompetensi.

- **Ketersediaan dan Kelayakan Infrastruktur**
Banyak destinasi wisata di Kabupaten Kebumen yang masih mengalami kendala infrastruktur, terutama terkait akses jalan dan fasilitas penunjang yang belum memenuhi standar pelayanan minimum. Hal ini berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan wisatawan.
- **Koordinasi dan Sinergi Antar Perangkat Daerah**
Tingkat koordinasi yang belum optimal antar perangkat daerah yang terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan dinas teknis lainnya, menjadi kendala dalam pelaksanaan program kepariwisataan dan kebudayaan. Oleh karena itu, dibutuhkan forum lintas sektor guna menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan program serta mempercepat proses pengambilan kebijakan.
- **Strategi Promosi dan Branding Daerah**
Belum adanya strategi promosi dan branding yang terintegrasi menyebabkan rendahnya daya saing destinasi wisata Kebumen di tingkat nasional. Pemanfaatan media digital secara maksimal dan penguatan citra destinasi melalui brand identity yang kuat perlu menjadi prioritas dalam strategi promosi daerah.
- **Ancaman Modernisasi terhadap Budaya Lokal**
Perubahan sosial dan budaya akibat modernisasi dapat mengancam kelestarian warisan budaya daerah. Untuk itu, perlu strategi pelestarian budaya yang adaptif, kolaboratif, serta berbasis teknologi, agar nilai-nilai budaya dapat tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman.
- **Partisipasi Masyarakat**
Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan masih rendah. Padahal, partisipasi aktif masyarakat, khususnya pelaku UMKM, sangat penting dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Program pemberdayaan masyarakat dan pelibatan komunitas lokal perlu terus ditingkatkan.

2. Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata dan pelestarian kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dihadapkan pada berbagai permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi potensi daerah. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- **Keterbatasan Anggaran**
Permasalahan: Ketersediaan anggaran yang terbatas menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, pemeliharaan destinasi, serta pelaksanaan promosi pariwisata dan pelestarian budaya.

Dampak: Banyak destinasi wisata mengalami penurunan kualitas karena kurangnya pemeliharaan. Program pelestarian budaya juga tidak dapat dijalankan secara menyeluruh, sehingga inovasi pengembangan potensi baru menjadi terbatas.

- **Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**
Permasalahan: SDM yang tersedia belum sepenuhnya memiliki kompetensi teknis di bidang manajemen pariwisata, kebudayaan, dan pemasaran digital. Pelatihan dan peningkatan kapasitas masih minim.
Dampak: Pelayanan kepada wisatawan kurang optimal, pengelolaan destinasi belum inovatif, dan program pelestarian budaya tidak menunjukkan hasil yang signifikan.
- **Kurangnya Infrastruktur Pendukung Pariwisata**
Permasalahan: Ketersediaan infrastruktur dasar seperti akses jalan, transportasi umum, sanitasi, tempat parkir, serta fasilitas pendukung lainnya masih belum memadai.
Dampak: Kurangnya infrastruktur menyebabkan rendahnya kenyamanan dan kepuasan pengunjung, yang berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan serta kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah.
- **Lemahnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah**
Permasalahan: Koordinasi lintas perangkat daerah belum berjalan secara sinergis, terutama dengan dinas yang berkaitan langsung dalam mendukung pariwisata seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan.
Dampak: Program pengembangan pariwisata tidak dapat terlaksana secara terintegrasi. Misalnya, keterlambatan perbaikan akses jalan ke lokasi wisata akibat kurangnya koordinasi teknis.
- **Promosi Pariwisata yang Belum Optimal**
Permasalahan: Upaya promosi masih bersifat konvensional dan belum memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Strategi pemasaran belum terencana secara komprehensif dan terarah.
Dampak: Destinasi wisata unggulan Kabupaten Kebumen belum dikenal luas oleh publik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini menghambat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan.
- **Rendahnya Partisipasi Masyarakat Lokal**
Permasalahan: Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan masih minim. Masih banyak masyarakat yang belum memahami potensi ekonomi dari sektor ini.
Dampak: Potensi lokal tidak berkembang secara maksimal, dan manfaat ekonomi dari pariwisata belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
- **Ancaman Modernisasi terhadap Pelestarian Budaya**
Permasalahan: Perubahan gaya hidup dan arus modernisasi menyebabkan generasi muda kurang tertarik pada pelestarian budaya lokal. Beberapa tradisi mulai ditinggalkan atau terlupakan.
Dampak: Warisan budaya berisiko punah, yang akan berdampak pada hilangnya identitas budaya daerah serta berkurangnya daya tarik wisata berbasis budaya.

3. Dampak pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti Standar Pelayanan Minimal dan SDGs

Pencapaian visi dan misi kepala daerah Kabupaten Kebumen memiliki dampak signifikan terhadap capaian program nasional seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan program internasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan komitmen yang kuat dalam mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan secara berkelanjutan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta mendukung upaya global dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata serta pelestarian kebudayaan lokal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perangkat daerah dihadapkan pada berbagai tantangan yang mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, di balik tantangan tersebut, terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan kebudayaan secara berkelanjutan.

4.1. **Tantangan dalam Meningkatkan Pelayanan**

- a. Keterbatasan Infrastruktur Destinasi

Tantangan: Kurangnya fasilitas destinasi wisata. Kondisi ini berdampak pada kenyamanan dan keamanan pengunjung.

Strategi Penanganan: Meningkatkan koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan, serta mendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung destinasi.

- b. Terbatasnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Tantangan: Masih terdapat kekurangan dalam hal kapasitas dan kompetensi aparatur, khususnya terkait manajemen pariwisata, pemasaran digital, dan pemahaman terhadap pelestarian budaya.

Strategi Penanganan: Menyelenggarakan pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi secara berkala, terutama dalam bidang digital marketing, hospitality, dan pengelolaan event budaya.

- c. Keterbatasan Pendanaan

Tantangan: Ketersediaan anggaran yang terbatas menghambat pelaksanaan program strategis, seperti pembangunan infrastruktur, pelestarian budaya, dan kegiatan promosi.

Strategi Penanganan: Menggali alternatif pendanaan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), pemanfaatan dana desa, hibah dari pemerintah pusat, serta pelibatan CSR dan filantropi.

d. Promosi dan Branding yang Belum Optimal

Tantangan: Promosi destinasi wisata masih bersifat konvensional dan belum mengoptimalkan media digital secara maksimal. Branding pariwisata daerah juga belum memiliki identitas yang kuat.

Strategi Penanganan: Meningkatkan strategi promosi berbasis digital melalui media sosial, platform pariwisata, kolaborasi dengan influencer dan travel agent, serta penguatan brand identity destinasi wisata unggulan Kabupaten Kebumen.

e. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Tantangan: Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata dan pelestarian budaya masih rendah. Banyak warga yang belum memahami manfaat ekonomi dari sektor ini.

Strategi Penanganan: Mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pengembangan UMKM berbasis wisata, serta kolaborasi pengelolaan destinasi yang melibatkan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan komunitas lokal.

4.2. Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

a. Potensi Alam dan Budaya yang Belum Tergali Sepenuhnya

Peluang: Kabupaten Kebumen memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat potensial, seperti pantai, gua, pegunungan, serta seni dan tradisi lokal yang unik/ Kawasan Geopark Kebumen.

Langkah Strategis: Mengembangkan wisata berbasis potensi lokal, seperti ekowisata, wisata petualangan, dan wisata budaya yang mengedepankan keaslian dan keterlibatan masyarakat lokal/ Pemberdayaan masyarakat di wilayah Geopark Kebumen.

b. Dukungan Program Nasional dari Pemerintah Pusat

Peluang: Tersedianya program strategis nasional di bidang pariwisata dan kebudayaan seperti program revitalisasi budaya, pengembangan desa wisata, dan kampanye wisata domestik.

Langkah Strategis: Mengintegrasikan program daerah dengan program nasional, serta mengajukan proposal pengembangan destinasi unggulan ke kementerian terkait untuk memperoleh dukungan teknis dan finansial.

c. Pemanfaatan Teknologi Digital

Peluang: Era digital membuka ruang luas bagi transformasi pelayanan publik, termasuk promosi, manajemen informasi wisata, serta interaksi dengan wisatawan.

Langkah Strategis: Mengembangkan sistem informasi pariwisata berbasis website dan aplikasi, memperkuat kehadiran digital di media sosial, dan menyediakan layanan informasi berbasis teknologi yang mudah diakses oleh masyarakat dan wisatawan.

d. Tren Wisata Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Peluang: Meningkatnya kesadaran wisatawan terhadap pentingnya keberlanjutan membuka peluang bagi pengembangan destinasi wisata yang berbasis konservasi alam dan budaya.

Langkah Strategis: Mendorong pengembangan destinasi eco-tourism dan community-based tourism dengan pelibatan aktif masyarakat, serta menyusun pedoman pengelolaan wisata yang ramah lingkungan.

e. Potensi Pengembangan Wisata Edukasi dan Budaya

Peluang: Tingginya minat terhadap wisata edukasi dan budaya dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan Kebumen sebagai pusat pembelajaran budaya dan sejarah.

Langkah Strategis: Mengembangkan paket wisata edukatif bagi pelajar dan mahasiswa, serta menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan kunjungan wisata dengan kurikulum pembelajaran.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, perlu dirumuskan langkah-langkah strategis berdasarkan identifikasi isu-isu krusial yang dihadapi. Perumusan ini tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, tetapi juga menangkap peluang besar, seperti pengembangan Geopark Kebumen sebagai destinasi unggulan berskala nasional dan internasional..

a. Pengembangan Infrastruktur Wisata yang Memadai

Isu Penting:

Keterbatasan infrastruktur dasar di sejumlah destinasi wisata, termasuk area geosite geopark, menyebabkan rendahnya kenyamanan dan aksesibilitas bagi wisatawan.

Rekomendasi Strategis:

- Memprioritaskan pembangunan dan perbaikan akses jalan ke lokasi wisata utama, termasuk situs geologi penting di kawasan Geopark Kebumen.
- Mengembangkan fasilitas pendukung standar wisatawan seperti pusat informasi, toilet, parkir, signage digital, dan jalur ramah disabilitas.
- Meningkatkan sinergi lintas dinas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur berbasis pariwisata.

b. Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Kebudayaan

Isu Penting:

Rendahnya kompetensi pengelola wisata, pelaku ekonomi kreatif, serta tenaga promosi digital menjadi kendala dalam memberikan pelayanan profesional.

Rekomendasi Strategis:

- Menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajerial pariwisata, termasuk interpretasi geopark, pengelolaan destinasi berkelanjutan, dan promosi digital.
- Melibatkan akademisi, lembaga sertifikasi profesi, dan mitra Geopark untuk menyusun kurikulum pelatihan tematik.
- Memfasilitasi pelatihan bagi pemuda lokal sebagai pemandu wisata geologi dan budaya.

c. Penguatan Branding dan Promosi Pariwisata Kabupaten Kebumen

Isu Penting:

Kebumen belum memiliki identitas pariwisata yang kuat dan belum mampu bersaing dalam kancah promosi pariwisata nasional dan global.

Rekomendasi Strategis:

- Menetapkan dan menyosialisasikan branding pariwisata daerah berbasis Geopark.
- Mengembangkan sistem pemasaran digital melalui website interaktif, media sosial, e-tourism, dan platform video promosi geopark.
- Berpartisipasi aktif dalam pameran pariwisata nasional maupun internasional serta menjalin kerja sama dengan travel agent dan tour operator.

d. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism)

Isu Penting:

Pengelolaan destinasi wisata yang belum sepenuhnya mengadopsi prinsip keberlanjutan berisiko menimbulkan degradasi lingkungan dan budaya.

Rekomendasi Strategis:

- Mengintegrasikan prinsip eco-tourism dan geowisata dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).
- Menerapkan sistem zonasi konservasi dan pembatasan kunjungan di geosite sensitif, serta edukasi terhadap wisatawan
- Memberdayakan masyarakat dalam kegiatan konservasi berbasis wisata, seperti program wisata edukasi lingkungan.

e. Pengembangan Produk Wisata Kreatif dan Pelestarian Budaya Lokal.

Isu Penting:

Produk budaya belum dikemas secara menarik sebagai bagian dari daya tarik wisata. Nilai-nilai kearifan lokal mulai tergerus oleh perkembangan zaman.

Rekomendasi Strategis:

- Mengintegrasikan nilai budaya lokal dalam interpretasi geopark, seperti tari, cerita rakyat, dan kuliner tradisional sebagai media edukasi geowisata.
- Menyelenggarakan kegiatan budaya berkala, seperti Festival Budaya Geopark, untuk memperkuat identitas lokal dan menarik minat wisatawan.
- Mendukung revitalisasi seni tradisional, regenerasi seniman, serta pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis komunitas.

f. Peningkatan Kemitraan dengan Swasta, Akademisi, dan Komunitas

Isu Penting:

Kemitraan lintas sektor dalam pengembangan pariwisata dan budaya masih bersifat sporadis dan belum terstruktur.

Rekomendasi Strategis:

- Membangun platform kolaboratif antara pemerintah daerah, komunitas Geopark, pelaku UMKM, dan pelaku wisata dalam bentuk forum komunikasi dan jejaring strategis.
- Menggandeng akademisi dalam riset dan promosi destinasi geopark serta pengembangan model pembelajaran berbasis geowisata.
- Mengembangkan kemitraan CSR dengan sektor swasta untuk mendukung pembiayaan program wisata dan pelestarian budaya.

g. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan

Isu Penting:

Belum adanya kebijakan spesifik yang mengatur pengelolaan geopark dan perlindungan situs geologi dan budaya sebagai aset pariwisata jangka panjang.

Rekomendasi Strategis:

- Menyusun regulasi khusus terkait pengelolaan kawasan Geopark Kebumen, termasuk pelibatan masyarakat dan konservasi situs geologi.
- Mengembangkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis warisan lokal.
- Menetapkan kebijakan insentif bagi pelaku usaha pariwisata yang menerapkan prinsip keberlanjutan dan pelestarian budaya.

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

1. Perbandingan antara rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan (penetapan RKPD)

Penyusunan perubahan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mengacu pada dokumen Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen. Rancangan awal Perubahan RKPD tersebut disusun berdasarkan arah kebijakan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026, serta memperhatikan RKP, Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah, Program Strategis Nasional, dan Pedoman Penyusunan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Rancangan awal Perubahan RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan tahunan daerah yang menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rancangan Awal Perubahan Renja. Penyusunan dilakukan dengan pendekatan teknokratis dan partisipatif, serta mempertimbangkan dinamika kebijakan nasional dan daerah.

Namun, dalam proses verifikasi dan pendalaman substansi program, terdapat sejumlah perubahan terhadap rancangan awal Perubahan Renja, baik berupa penambahan maupun pengurangan kegiatan. Perubahan ini merupakan hasil dari proses analisis kebutuhan, telaah dokumen perencanaan, dan penyesuaian terhadap kebijakan terbaru.

Dasar Hukum dan Pertimbangan Perubahan:

Perubahan kegiatan dan program didasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, khususnya terkait tahapan dan mekanisme perubahan RPJP dan RPJMD;
- Permendagri Nomor 900 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025

- Penyesuaian terhadap RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026;
- Penyesuaian terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026.

Perbandingan Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada Tabel 2.6/ Tabel. T-C.31 sebagai berikut

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kebumen
Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

No			Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.909.888.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				3.290.347.100
1			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase Kesenian yang Dikembangkan	46,88%	1.737.388.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase Kesenian yang Dikembangkan	46,88%	3.132.753.100
	1		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase kegiatan pengembangan kebudayaan Kebumen	65%	160.077.000	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase kegiatan pengembangan kebudayaan Kebumen	65%	139.042.000
		1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	75.169.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	70.024.000
		2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	100 Orang	84.908.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	100 Orang	69.018.000
	2		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase kegiatan pelestarian kesenian tradisional	100%	1.577.311.000	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase kegiatan pelestarian kesenian tradisional	100%	2.993.711.100
		3	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan,	4 Objek	1.421.716.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan,	4 Objek	2.858.901.100

No			Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
					Pengembangan dan Pemanfaatan					Pengembangan dan Pemanfaatan		
		4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	155.595.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	134.810.000
2			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	30,77%	172.500.000	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	30,77%	157.594.000
	3		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Prosentase cagar budaya yang dilestarikan	34%	172.500.000	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Prosentase cagar budaya yang dilestarikan	34%	157.594.000
		5	Pelindungan Cagar Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	10 Objek	82.000.000	Pelindungan Cagar Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	10 Objek	70.980.000
		6	Pengembangan Cagar Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	90.500.000	Pengembangan Cagar Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	86.614.000
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				33.061.521.331	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				13.642.499.806
3			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7.019.806.331	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6.788.656.806
	4		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	6 dokumen	96.632.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	6 dokumen	56.503.806

No			Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
		7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	81.632.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	45.198.806
		8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	11.305.000
	5		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	5.773.574.331	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	5.999.717.000
		9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/b ulan	5.574.357.331	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bula n	5.673.221.000
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	2 Dokumen	199.217.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	2 Dokumen	326.496.000
	6		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan diklat dalam 1 tahun	1 kali	65.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan diklat dalam 1 tahun	1 kali	0
		11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	65.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	0
		12	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	1500 Orang	0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	1500 Orang	0
	7		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	261.200.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	131.713.000
		13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	1 Paket	33.400.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	30.600.000

No			Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
					n Bangunan Kantor yang Disediakan				n, Semua Kelurahan	Bangunan Kantor yang Disediakan		
		1 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	51.300.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.255.000
		1 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.350.000
		1 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.500.000
		1 7	Penyediaan Bahan/Material	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	21.008.000
		1 8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	78.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	24.000.000
	8		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33 unit	215.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28 unit	105.000.000
		1 9	Pengadaan Mebel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit	25.000.000	Pengadaan Mebel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	15.000.000
		2 0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	190.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	90.000.000

No			Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
	9		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	332.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	289.416.000
		2 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000
		2 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	260.000.000
		2 3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.416.000
	1 0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49 unit	276.400.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56 unit	206.307.000
		2 4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	160.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	139.907.000
		2 5	Pemeliharaan Mebel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	4.200.000	Pemeliharaan Mebel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	4.200.000
		2 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	18.200.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	18.200.000

No			Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
		2 7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	94.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	44.000.000
4			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata	88,39%	23.438.668.000	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata	88,39%	4.031.383.000
	1 1		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	77.847.000	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	87.611.000
		2 8	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	250 orang	77.847.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	250 orang	87.611.000
	1 2		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah sarana prasarana destinasi pariwisata yang di kelola	9 unit	23.306.454.000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah sarana prasarana destinasi pariwisata yang di kelola	9 unit	3.902.933.000
		2 9	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	88.081.000	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen	77.031.000
		3 0	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	9 Unit	20.351.965.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	9 Unit	1.076.136.000
		3 1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Laporan	2.866.408.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Laporan	2.749.766.000

No			Rancangan Awal Renja PD				Hasil Analisis Kebutuhan					
			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
	1 3		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Rekomendasi Jumlah TDUP yang diterbitkan terhadap TDUP yg diajukan	100%	54.367.000	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Rekomendasi Jumlah TDUP yang diterbitkan terhadap TDUP yg diajukan	100%	40.839.000
		3 2	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	13.851.000	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.018.000
		3 3	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Laporan	40.516.000	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Laporan	30.821.000
5			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	33%	2.529.595.000	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	33%	2.563.603.000
	1 4		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara	1.500.22 5 orang	2.529.595.000	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara	1.500.225 orang	2.563.603.000
		3 4	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 kegiatan	2.529.595.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 kegiatan	2.563.603.000
6			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dibina	20,00%	73.452.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dibina	20,00%	258.857.000
	1 5		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1 kegiatan	73.452.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1 kegiatan	258.857.000

No			Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
		3 5	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	150 Orang	73.452.000	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	150 Orang	258.857.000
JUMLAH							34.971.409.331					16.932.846.906

2. Penjelasan Mengenai Alasan Proses Tersebut Dilakukan
Dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD), proses perbandingan antara rancangan awal Renja dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan tahapan krusial yang harus dilakukan. Ada beberapa alasan penting mengapa proses ini dilakukan untuk memastikan keselarasan perencanaan dan implementasi program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Berikut adalah penjelasan mengenai alasan-alasan tersebut:

a. Keselarasan dengan Prioritas Pembangunan Daerah
Alasan: Proses perbandingan antara rancangan awal Renja Perangkat Daerah dan hasil analisis kebutuhan dalam RKPD dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan oleh perangkat daerah selaras dengan prioritas pembangunan daerah. RKPD merupakan dokumen yang memuat arahan strategis dari pemerintah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan masyarakat yang telah dianalisis secara komprehensif.

Penjelasan: RKPD dirumuskan berdasarkan berbagai masukan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, serta masukan dari berbagai stakeholder. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah harus dibandingkan dengan RKPD untuk memastikan bahwa program-program perangkat daerah tidak keluar dari jalur prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sumber daya yang ada, baik anggaran maupun tenaga, dapat diarahkan pada kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian tujuan strategis daerah.

b. Optimalisasi Sumber Daya dan Anggaran
Alasan: Perbandingan ini juga dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan anggaran. Dengan membandingkan rancangan awal Renja dengan hasil analisis kebutuhan di RKPD, perangkat daerah dapat mengidentifikasi program dan kegiatan mana yang benar-benar mendesak dan memiliki dampak besar terhadap masyarakat serta pembangunan daerah.

Penjelasan: Analisis kebutuhan yang dilakukan dalam proses penetapan RKPD telah mempertimbangkan skala prioritas, kebutuhan masyarakat yang mendesak, serta

kondisi fiskal daerah. Rancangan awal Renja yang mungkin masih bersifat umum dan luas perlu diselaraskan dengan RKPD agar anggaran dapat digunakan secara efisien dan efektif. Ini juga membantu perangkat daerah menghindari pendanaan program yang kurang relevan dengan kebutuhan daerah atau yang kurang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.

c. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Alasan: Proses perbandingan ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perencanaan pembangunan. Dengan membandingkan rancangan awal Renja dengan RKPD yang sudah melalui proses analisis kebutuhan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang diusulkan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penjelasan: RKPD merupakan dokumen perencanaan yang telah melalui tahapan konsultasi publik dan diskusi dengan berbagai pihak, sehingga memiliki legitimasi yang lebih kuat dibandingkan rancangan awal Renja yang mungkin masih bersifat internal perangkat daerah. Dengan demikian, proses perbandingan ini memastikan bahwa setiap program yang diusulkan oleh perangkat daerah memiliki justifikasi yang jelas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam aspek penggunaan anggaran dan hasil yang diharapkan.

d. Penyesuaian Terhadap Perubahan Kebijakan atau Kondisi Terkini

Alasan: Perbandingan rancangan awal Renja dengan RKPD juga dilakukan untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perubahan kebijakan atau kondisi terkini yang mungkin terjadi sejak penyusunan rancangan awal Renja.

Penjelasan: Situasi dan kebijakan dapat berubah dari waktu ke waktu, baik di tingkat pusat maupun daerah. Misalnya, adanya perubahan kebijakan fiskal, munculnya kebutuhan mendesak akibat bencana alam, atau perubahan prioritas pembangunan di tingkat nasional. Melalui penetapan RKPD, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut, dan rancangan awal Renja perangkat daerah harus diperbaharui sesuai dengan perkembangan baru yang tertuang dalam RKPD. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang akan dijalankan tetap relevan dengan kondisi terkini.

e. Sinkronisasi Antar Perangkat Daerah

Alasan: Proses perbandingan ini juga berfungsi untuk menyinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi program yang dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pembangunan.

Penjelasan: RKPD disusun dengan mempertimbangkan peran dan tanggung jawab setiap perangkat daerah. Oleh karena itu, melalui perbandingan ini, perangkat daerah dapat melihat posisi mereka dalam keseluruhan rencana pembangunan daerah, serta menghindari program yang serupa atau redundan dengan perangkat daerah lain. Sinkronisasi ini juga penting untuk menciptakan sinergi antar perangkat daerah dalam melaksanakan program-program lintas sektor yang memerlukan koordinasi bersama.

3. Penjelasan Temuan-Temuan Setelah Proses Tersebut Dan Catatan Penting Terhadap Perbedaan Dengan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui proses perbandingan antara rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan hasil analisis kebutuhan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), beberapa temuan penting dapat diidentifikasi. Temuan-temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara rancangan awal dan hasil akhir yang diharapkan, yang didasarkan pada analisis kebutuhan yang lebih mendalam. Berikut adalah temuan-temuan utama beserta catatan penting mengenai perbedaan tersebut:

a. Temuan: Keterbatasan Anggaran Terhadap Beberapa Kegiatan

Penjelasan: Hasil perbandingan menunjukkan bahwa beberapa program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan awal Renja tidak mendapatkan alokasi anggaran yang cukup, karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Alokasi anggaran dalam RKPD lebih difokuskan pada program-program prioritas yang dianggap mendesak dan memiliki dampak signifikan bagi pembangunan daerah.

Catatan Penting:

Rasionalisasi Anggaran: Perangkat daerah harus melakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran dengan memprioritaskan program yang dapat memberikan

manfaat langsung kepada masyarakat, serta mengurangi atau menunda program-program yang kurang mendesak. Pemanfaatan Sumber Daya Alternatif: Perangkat daerah perlu mencari sumber pendanaan alternatif, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), kerja sama dengan sektor swasta, atau memanfaatkan hibah untuk mendukung program yang penting tetapi tidak mendapat prioritas anggaran dari APBD.

b. Temuan: Kebutuhan Penajaman Program Berbasis Analisis Kebutuhan Masyarakat

Penjelasan: Proses perbandingan dengan RKPD menunjukkan bahwa beberapa program dalam rancangan awal Renja tidak sepenuhnya berdasarkan pada hasil analisis kebutuhan masyarakat yang aktual. Misalnya, program pengembangan pariwisata di wilayah tertentu tidak didukung oleh data terkait potensi wisata dan kesiapan infrastruktur di wilayah tersebut.

Catatan Penting:

Penajaman Berdasarkan Data: Program-program dalam Renja perlu disesuaikan dan ditajamkan berdasarkan data dan analisis yang lebih akurat, terutama terkait dengan kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, dan keterkaitan dengan program prioritas nasional seperti SDGs atau Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Keterlibatan Masyarakat: Perangkat daerah perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, sehingga program-program yang diusulkan lebih sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

c. Temuan: Perluasan Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

Penjelasan: Rancangan awal Renja cenderung fokus pada pelaksanaan program oleh perangkat daerah itu sendiri, tanpa memperhitungkan peran dan kontribusi pemangku kepentingan lain, seperti pihak swasta, komunitas lokal, serta lembaga pendidikan atau riset.

Catatan Penting:

Kolaborasi Multi-Stakeholder: Perangkat daerah harus memperluas keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Misalnya, sektor swasta dapat berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur pariwisata, sementara komunitas lokal bisa dilibatkan dalam pengelolaan destinasi wisata.

Kerjasama dengan Akademisi dan Lembaga Riset: Penguatan kerja sama dengan lembaga akademis dan riset

juga penting untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif terkait pengembangan program yang berbasis bukti.

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program/Kegiatan pada Disparbud Kabupaten Kebumen selain bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) juga berasal dari usulan para pemangku kepentingan, dalam hal ini Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD (politis). Adapun usulan Musrenbang (Partisipatif) yang masuk untuk Renja Perubahan Disparbud tahun 2025 pada Tabel. 2.7.

Tabel 2.7
Usulan Pokok Pikiran (POKIR) Tahun 2025
Disparbud Kabupaten Kebumen

No	Sub kegiatan	Uraian	Rincian	
			Koefisien	Jumlah (Rp)
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		
1		Penerima Hibah : Fatayat NU Ranting Desa Kedalemanwetan Kec. Puring Alamat : Desa Kedalemanwetan Kec. Puring	1 Paket	10.000.000
2		Penerima Hibah : Karang Taruna Desa Argopeni Kec. Kebumen Alamat : Desa Argopeni Kec. Kebumen	1 Paket	10.000.000
3		Penerima Hibah : Karang Taruna Desa Argosari Kec. Ayah Alamat : Desa Argosari Kec. Ayah	1 Paket	10.000.000
4		Penerima Hibah : Karang Taruna Desa Gemeksekti Kec. Kebumen Alamat : Desa Gemeksekti Kec. Kebumen	1 Paket	15.000.000
5		Penerima Hibah : Karang Taruna Desa Jerukagung Kec. Klirong Alamat : Desa Jerukagung Kec. Klirong	1 Paket	50.000.000
6		Penerima Hibah : Karang Taruna Desa Jladri Kec. Buayan Alamat : Desa Jladri Kec. Buayan	1 Paket	20.000.000
7		Penerima Hibah : Karang Taruna Desa Kalirancang Kec. Alian Alamat : Desa Kalirancang Kec. Alian	1 Paket	30.000.000
8		Penerima Hibah : Karang Taruna Desa Kretek Kec. Rowokele Alamat : Desa Kretek Kec. Rowokele	1 Paket	25.000.000
9		Penerima Hibah : Karang Taruna Desa Purbowangi Kec. Buayan Alamat : Desa Purbowangi Kec. Buayan	1 Paket	25.000.000
10		Penerima Hibah : Karang Taruna Desa Rogodadi Kec. Buayan Alamat : Desa Rogodadi Kec. Buayan	1 Paket	10.000.000
11		Penerima Hibah : Karang Taruna Desa Sumberadi Kec. Kebumen Alamat : Desa Sumberadi Kec. Kebumen	1 Paket	10.000.000
12		Penerima Hibah : Karang Taruna Desa Tambakagung Kec. Klirong Alamat : Desa Tambakagung Kec. Klirong	1 Paket	50.000.000

No	Sub kegiatan	Uraian	Rincian	
			Koefisien	Jumlah (Rp)
13		Penerima Hibah : Karangtaruna Desa Wonoharjo Kec. Rowokele Alamat : Desa Wonoharjo Kec. Rowokele	1 Paket	75.000.000
14		Penerima Hibah : Muslimat NU Ranting Desa Arjowinangun Kec. Puring Alamat : Desa Arjowinangun Kec. Puring	1 Paket	10.000.000
15		Penerima Hibah : Muslimat NU Ranting Desa Kaleng Kec. Puring Alamat : Desa Kaleng Kec. Puring	1 Paket	10.000.000
16		Penerima Hibah : Muslimat NU Ranting Desa Madurejo Kec. Puring Alamat : Desa Madurejo Kec. Puring	1 Paket	10.000.000
17		Penerima Hibah : Muslimat NU Ranting Desa Puliharjo Kec. Puring Alamat : Desa Puliharjo Kec. Puring	1 Paket	10.000.000
18		Penerima Hibah : Muslimat NU Ranting Desa Purwoharjo Kec. Puring Alamat : Desa Purwoharjo Kec. Puring	1 Paket	10.000.000
19		Penerima Hibah : Muslimat NU Ranting Desa Purwosari Kec. Puring Alamat : Desa Purwosari Kec. Puring	1 Paket	10.000.000
20		Penerima Hibah : Muslimat NU Ranting Desa Sidoharjo Kec. Puring Alamat : Desa Sidoharjo Kec. Puring	1 Paket	10.000.000
21		Penerima Hibah : Muslimat NU Ranting Desa Srusuhjurutengah Kec. Puring Alamat : Desa Srusuhjurutengah Kec. Puring	1 Paket	10.000.000
22		Penerima Hibah : Muslimat NU Ranting Desa Waluyorejo Kec. Puring Alamat : Desa Waluyorejo Kec. Puring	1 Paket	10.000.000
23		Penerima Hibah : Muslimat NU Ranting Desa Wetonwetan Kec. Puring Alamat : Desa Wetonwetan Kec. Puring	1 Paket	10.000.000
24		Penerima Hibah : PAC Muslimat NU Kec. Sruweng Kab. Kebumen Alamat : Kec. Sruweng Kab. Kebumen	1 Paket	50.000.000
25		Penerima Hibah : TP PKK Desa Brecong Kec. Buluspesantren Alamat : Desa Brecong Kec. Buluspesantren	1 Paket	10.000.000
26		Penerima Hibah : TP PKK Desa Muktisari Kec. Kebumen Alamat : Desa Muktisari Kec. Kebumen	1 Paket	10.000.000
27		Penerima Hibah : TP PKK Desa Pandansari Kec. Sruweng Alamat : Desa Pandansari Kec. Sruweng	1 Paket	30.000.000
28		Penerima Hibah : TP PKK Desa Panjangsari Kec. Gombong Alamat : Desa Panjangsari Kec. Gombong	1 Paket	10.000.000
29		Penerima Hibah : TP PKK Desa Tambakrejo Kec. Buluspesantren Alamat : Desa Tambakrejo Kec. Buluspesantren	1 Paket	10.000.000
30		Penerima Hibah : TP PKK Desa Wonoharjo Kec. Rowokele Alamat : Desa Wonoharjo Kec. Rowokele	1 Paket	15.000.000
31		Penerima Hibah : Karang Taruna Desa Kutosari Kec. Kebumen Alamat : Desa Kutosari Kec. Kebumen	1 Paket	110.000.000

No	Sub kegiatan	Uraian	Rincian	
			Koefisien	Jumlah (Rp)
32		Penerima Hibah : Lembaga RT 01 RW 02 Desa Pengempon Kec. Sruweng Alamat : Desa Pengempon Kec. Sruweng	1 Paket	30.000.000
33		Penerima Hibah : Lembaga RT 02 RW 01 Desa Pengempon Kec. Sruweng Alamat : Desa Pengempon Kec. Sruweng	1 Paket	50.000.000
34		Penerima Hibah : Lembaga RW 04 Desa Karangkemiri Kec. Karanganyar Alamat : Desa Karangkemiri Kec. Karanganyar	1 Paket	50.000.000
35		Penerima Hibah : Paguyuban Kawulo Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Kab. Kebumen Alamat : Desa Kewayuhan Kec. Pejagoan	1 Paket	60.000.000
36		Penerima Hibah : Barisan Ansor Serbaguna NU Desa Bumirejo Kec. Puring Alamat : Desa Bumirejo Kec. Puring	1 Paket	100.000.000
37		Penerima Hibah : Barisan Ansor Serbaguna NU Desa Sidoagung Kec. Sruweng Alamat : Desa Sidoagung Kec. Sruweng	1 Paket	100.000.000
38		Penerima Hibah : Fatayat NU Ranting Desa Sruweng Kec. Sruweng Alamat : Desa Sruweng Kec. Sruweng	1 Paket	20.000.000
39		Penerima Hibah : Grup Rukun Putra Budaya Desa Tanggeran Kec. Sruweng Alamat : Desa Tanggeran Kec. Sruweng	1 Paket	15.000.000
40		Penerima Hibah : Karang Taruna Desa Babadsari Kec. Kutowinangun Alamat : Desa Babadsari Kec. Kutowinangun	1 Paket	20.000.000
41		Penerima Hibah : Karang Taruna Desa Benerkulon Kec. Ambal Alamat : Desa Benerkulon Kec. Ambal	1 Paket	10.000.000
42		Penerima Hibah : Karang Taruna Desa Candimulyo Kec. Kebumen Alamat : Desa Candimulyo Kec. Kebumen	1 Paket	10.000.000
43		Penerima Hibah : Karang Taruna Desa Giyanti Kec. Rowokele Alamat : Desa Giyanti Kec. Rowokele	1 Paket	15.000.000
44		Penerima Hibah : Karang Taruna Desa Gunungsari Kec. Karanggayam Alamat : Desa Gunungsari Kec. Karanggayam	1 Paket	10.000.000
45		Penerima Hibah : Karang Taruna Desa Kalibening Kec. Karanggayam Alamat : Desa Kalibening Kec. Karanggayam	1 Paket	10.000.000
46		Penerima Hibah : Karang Taruna Desa Logandu Kec. Karanggayam Alamat : Desa Logandu Kec. Karanggayam	1 Paket	20.000.000
47		Penerima Hibah : Karang Taruna Desa Pekunden Kec. Kutowinangun Alamat : Desa Pekunden Kec. Kutowinangun	1 Paket	10.000.000
48		Penerima Hibah : Karang Taruna Desa Sidoarjo Kec. Sruweng Alamat : Desa Sidoarjo Kec. Sruweng	1 Paket	15.000.000
49		Penerima Hibah : Karang Taruna Desa Sirnobojo Kec. Bonorowo Alamat : Desa Sirnobojo Kec. Bonorowo	1 Paket	30.000.000
50		Penerima Hibah : Karang Taruna Desa Tambakrejo Kec. Buluspesantren Alamat : Desa Tambakrejo Kec. Buluspesantren	1 Paket	15.000.000

No	Sub kegiatan	Uraian	Rincian	
			Koefisien	Jumlah (Rp)
51		Penerima Hibah : Komunitas Titik Kumpul Desa Demangsari Kec. Ayah Alamat : Desa Demangsari Kec. Ayah	1 Paket	40.000.000
52		Penerima Hibah : Lembaga RT 01 RW 02 Desa Logandu Kec. Karanggayam Alamat : Desa Logandu Kec. Karanggayam	1 Rupiah	15.000.000
53		Penerima Hibah : Ranting Muslimat NU Desa Logandu Kec. Karanggayam Alamat : Desa Logandu Kec. Karanggayam	1 Paket	10.000.000
54		Penerima Hibah : TP PKK Desa Ambalresmi Kec. Ambal Alamat : Desa Ambalresmi Kec. Ambal	1 Paket	15.000.000
55		Penerima Hibah : TP PKK Desa Arjosari Kec. Adimulyo Alamat : Desa Arjosari Kec. Adimulyo	1 Paket	10.000.000
56		Penerima Hibah : TP PKK Desa Donorojo Kec. Sempor Alamat : Desa Donorojo Kec. Sempor	1 Paket	10.000.000
57		Penerima Hibah : TP PKK Desa Glontor Kec. Karanggayam Alamat : Desa Glontor Kec. Karanggayam	1 Paket	18.021.100
58		Penerima Hibah : TP PKK Desa Jintung Kec, Ayah Alamat : Desa Jintung Kec. Ayah	1 Paket	10.000.000
59		Penerima Hibah : TP PKK Desa Karanggayam Kec.Karanggayam Alamat : Desa Karanggayam Kec. Karanggayam	1 Paket	20.000.000
60		Penerima Hibah : TP PKK Desa Karangsari Kec. Kutowinangun Alamat : Desa Karangsari Kec. Kutowinangun	1 Paket	10.000.000
61		Penerima Hibah : TP PKK Desa Kedawung Kec. Pejagoan Alamat : Desa Kedawung Kec. Pejagoan	1 Paket	20.000.000
62		Penerima Hibah : TP PKK Desa Mrinen Kec. Kutowinangun Alamat : Desa Mrinen Kec. Kutowinangun	1 Paket	20.000.000
63		Penerima Hibah : TP PKK Desa Pucangan Kec. Ambal Alamat : Desa Pucangan Kec. Ambal	1 Paket	15.000.000
64		Penerima Hibah : TP PKK Desa Sangubanyu Kec. Buluspesantren Alamat : Desa Sangubanyu Kec. Buluspesantren	1 Paket	15.000.000
JUMLAH				1.503.021.100

*Sumber : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen perlu mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi yang relevan. Telaah terhadap kebijakan ini menjadi langkah penting agar perencanaan daerah selaras dengan arah pembangunan nasional dan provinsi, serta turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berikut adalah telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi yang relevan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen:

1. Kebijakan Nasional

a. Kebijakan Nasional (RPJMN 2025–2029 dan Strategi Parekraf 2025))

Isi Kebijakan: RPJMN 2020-2024 menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pariwisata diharapkan dapat menjadi sumber devisa, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pengembangan infrastruktur daerah. Dalam hal kebudayaan, kebijakan nasional juga menekankan pentingnya pelestarian warisan budaya dan peningkatan daya saing budaya lokal melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya.

a. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029

Isi Kebijakan:

RPJMN 2025–2029, yang ditetapkan melalui Perpres No.12 Tahun 2025, menjadi kerangka strategis pembangunan nasional lima tahunan. Dokumen ini meliputi kebijakan umum, program kementerian/lembaga, pendekatan tematik dan spasial, serta kerangka pembiayaan pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Relevansi bagi Kebumen:

Mendorong sinergi sektor pariwisata dan kebudayaan dalam konteks tematik, holistik, dan spasial—yg sangat relevan untuk pengembangan destinasi seperti Geopark Kebumen.

Menjadi pedoman perumusan program yang berdasar pada keberlanjutan, inovasi, dan inklusivitas dalam perencanaan daerah.

b. Strategi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) 2025

Isi Kebijakan:

Kemenparekraf telah menyusun strategi 2025 yang sejalan dengan RPJMN, mencakup penguatan SDM, pengembangan destinasi berkelanjutan, diversifikasi pariwisata (termasuk geopark), dan pengembangan ekonomi kreatif digital.

Rekomendasi bagi Kebumen:

Mendorong pengembangan geopark sebagai destinasi prioritas dengan pendekatan regeneratif dan berkelanjutan.

Menyiapkan SDM lokal yang kompeten melalui pelatihan pariwisata, interpretasi geowisata, dan digital marketing..

- b. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS)
Isi Kebijakan: Mengatur pengembangan destinasi pariwisata nasional secara berkelanjutan, penguatan kelembagaan, SDM, dan infrastruktur pendukung.

Dampak dan Relevansi bagi Kabupaten Kebumen:

Pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan di Kebumen harus diselaraskan dengan prinsip eco-tourism dan konservasi lingkungan.

Infrastruktur aksesibilitas dan fasilitas wisata di lokasi strategis perlu diperkuat sesuai dengan standar RIPPARNAS..

- c. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Isi Kebijakan: Menekankan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap kebudayaan nasional dan daerah.

Dampak dan Relevansi bagi Kabupaten Kebumen:

Pelestarian warisan budaya lokal seperti batik Kebumen, seni tari, serta tradisi lisan dan ritual budaya.

Peluang mengembangkan sektor ekonomi kreatif berbasis budaya lokal sebagai bagian dari promosi identitas daerah.

- d. Program Nasional SDGs (Sustainable Development Goals)

Isi Kebijakan: SDGs mencakup tujuan global seperti pembangunan berkelanjutan, inklusi sosial, pelestarian lingkungan, dan perlindungan budaya.

Dampak dan Relevansi bagi Kabupaten Kebumen:

Pengembangan pariwisata berkelanjutan yang inklusif dan ramah lingkungan di Kebumen.

Mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam pelestarian budaya dan pengelolaan pariwisata berbasis komunitas (community-based tourism).

2. Kebijakan Tingkat Provinsi Jawa Tengah

RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025–2029 menempatkan sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai salah satu leading sektor dalam pembangunan ekonomi daerah. Beberapa fokus utama dalam dokumen ini antara lain:

- Pengembangan destinasi wisata unggulan berbasis potensi lokal dan daya tarik tematik seperti wisata alam, budaya, religi, dan edukasi.
- Penguatan industri pariwisata yang terintegrasi dengan UMKM, ekonomi kreatif, dan pelibatan masyarakat secara aktif.
- Promosi budaya lokal baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memperkuat identitas budaya Jawa Tengah.
- Pembangunan kawasan berbasis geopark dan kawasan strategis pariwisata provinsi yang mendukung pariwisata berkelanjutan.

Telaah Dampak bagi Kabupaten Kebumen:

1. Sinergi dengan Destinasi Wisata Provinsi

Kebumen dapat diposisikan sebagai salah satu simpul dalam jalur pariwisata Jawa Tengah melalui:

- Pengembangan Geopark Kebumen sebagai destinasi kelas dunia yang telah mendapatkan pengakuan UNESCO Global Geopark (UGGp).
- Integrasi kawasan pantai selatan Kebumen (Pantai Menganti, Pantai Logending, dsb) dalam skema pengembangan Jalur Selatan Jawa (JLS) sebagai corridor wisata pesisir.
- Penguatan infrastruktur dan promosi yang terintegrasi dalam program provinsi, misalnya festival bersama, paket wisata lintas kabupaten/kota, serta promosi melalui media provinsi.

2. Penguatan Budaya Lokal

RPJMD Provinsi memberi ruang luas pada pelestarian budaya lokal, yang dapat dimanfaatkan oleh Kebumen melalui:

- Revitalisasi seni tradisional seperti wayang kancil, batik khas Kebumen, dan kuliner lokal sebagai bagian dari ekonomi kreatif berbasis budaya.
- Pengembangan event budaya rutin seperti Festival Geopark, Pekan Budaya, atau Pentas Seni Rakyat yang dapat masuk dalam kalender event pariwisata provinsi.
- Pelibatan seniman dan komunitas budaya dalam program pelatihan, pendampingan, dan promosi tingkat provinsi.

b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPADA)

Isi Kebijakan: Menggarisbawahi pengembangan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas destinasi, penguatan promosi, dan pengembangan SDM.

Dampak dan Relevansi bagi Kabupaten Kebumen:

- Akselerasi peningkatan kualitas destinasi wisata (aksesibilitas, fasilitas, daya tarik).
- Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi untuk peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif lokal.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen disusun sebagai pedoman strategis dalam merancang program dan kegiatan pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

1. Tujuan utama Renja meliputi:

- Meningkatkan daya saing dan kualitas destinasi wisata Kabupaten Kebumen.

Melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan layanan wisata, penguatan branding daerah, serta promosi pariwisata yang intensif dan inovatif di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

- Melestarikan dan mengembangkan warisan budaya lokal.
Dengan menjaga keberlangsungan tradisi, kesenian, situs sejarah, serta memanfaatkan kekayaan budaya sebagai sumber daya ekonomi dan identitas daerah.
- Memperkuat kapasitas SDM sektor pariwisata dan kebudayaan.
Meningkatkan kompetensi para pelaku wisata, seniman, dan penggiat ekonomi kreatif melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan yang berkelanjutan.
- Mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya dan pariwisata.
Mengintegrasikan sektor ekonomi kreatif dalam ekosistem pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal yang inovatif dan berbasis potensi daerah.
- Meningkatkan promosi dan pemasaran destinasi serta produk budaya unggulan.
Melalui media digital, event, kemitraan dengan pihak ketiga, serta perluasan jaringan promosi di tingkat nasional dan internasional.

2. Sasaran Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

Sasaran disusun untuk memberikan arah operasional yang terukur dalam upaya pencapaian tujuan Renja. Sasaran ini diharapkan dapat dicapai dalam jangka menengah (1 tahun perencanaan) dan menjadi dasar pengukuran kinerja perangkat daerah.

Sasaran utama Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen:

- Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara).
Target dicapai melalui pengembangan destinasi, pengemasan paket wisata, promosi terpadu, dan perbaikan fasilitas penunjang wisata.
- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata dan kebudayaan
Optimalisasi potensi retribusi objek wisata, kegiatan budaya, serta menarik investasi sektor pariwisata dan industri kreatif.
- Memelihara dan melestarikan situs budaya, sejarah, dan warisan tak benda
Melalui program inventarisasi, revitalisasi, dan pelibatan masyarakat serta komunitas budaya lokal dalam pelestarian.
- Meningkatkan keterlibatan pelaku ekonomi kreatif dalam sektor pariwisata dan kebudayaan
Memberikan ruang ekspresi, dukungan pembinaan, dan akses pasar bagi pelaku ekonomi kreatif seperti pengrajin, seniman, dan pelaku kuliner lokal.
- Mengembangkan paket-paket wisata terintegrasi

- Menyusun paket wisata berbasis alam, budaya, dan geowisata (Geopark Kebumen), yang melibatkan masyarakat dan sektor swasta.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pariwisata dan kebudayaan
Terutama yang terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk informasi wisata, layanan objek wisata, dan fasilitasi kegiatan budaya.
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya dan pengelolaan pariwisata
Melalui pemberdayaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), komunitas budaya, dan kemitraan berbasis desa wisata atau community-based tourism.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dan Rencana Kerja Disparbud tahun 2025 mencakup 6 Program, 15 Kegiatan, dan 35 Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Program, Kegiatan dan Subkegiatan Disparbud Kabupaten
Kebumen Tahun 2025

NO			URUSAN/ PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
1			2	3	4
			Urusan Bidang Kebudayaan		
1			Program Pengembangan Kebudayaan		
	1			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		1			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
		2			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
	2			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		3			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
		4			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
2			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		
	3			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
		5			Pelindungan Cagar Budaya
		6			Pengembangan Cagar Budaya

NO			URUSAN/ PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
3			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
	4			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
		7			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	5			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
		8			Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		9			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		10			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	6			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
		11			Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
		12			Pengelolaan Investasi Pariwisata
4			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
	7			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
		13			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
	8			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
		14			Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
6			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	9			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		15			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		16			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	11			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		17			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		18			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

NO			URUSAN/ PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN
	12			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		19			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		20			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		21			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		22			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		23			Penyediaan Bahan/Material
		24			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	13			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		25			Pengadaan Mebel
		26			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	14			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		27			Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		28			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		29			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	15			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		30			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		31			Pemeliharaan Mebel
		32			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		33			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan kelanjutan dari proses pembangunan yang telah dirancang pada tahun-tahun sebelumnya, serta mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah daerah, yaitu RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026.

Perencanaan program dan kegiatan tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan sebagai bagian dari perbandingan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025. Hasil analisis tersebut kemudian diselaraskan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024. Penyesuaian ini mengakibatkan adanya perubahan pada beberapa bagian, baik dari sisi prioritas maupun volume kegiatan.

Kerangka pendanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025, beserta prakiraan rencana pendanaan tahun berikutnya (Tahun 2026), disajikan secara rinci dalam Tabel 4.1

Tabel. 4.1.
Kerangka Pendanaan Program,Kegiatan,Subkegiatan Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Disparbud Kabupaten Kebumen

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL			DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PARIMISATADAN KEBUDAYAAN																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							34.971.409.331,00	15.437.888.000,00	16.932.306.906,00	-18.039.102.425,00							10.120.017.331,00		
									1.909.888.000,00	1.909.888.000,00	3.290.347.100,00	1.380.459.100,00							1.001.256.000,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1.909.888.000,00	1.909.888.000,00	3.290.347.100,00	1.380.459.100,00							1.001.256.000,00		
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kesenian yang Dikembangkan				46,88 %	46,88 %	1.737.388.000,00	1.737.388.000,00	3.132.753.100,00	-908.632.000,00							828.756.000,00		
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pengembangan kebudayaan Kebumen				65 %	65 %	160.077.000,00	160.077.000,00	139.042.000,00	-21.035.000,00			-	5. Peningkatan konduktivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat 5. Peningkatan konduktivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	Kelompok Kesenian		66.445.000,00	DINAS PARIWisATA DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.02.2.01.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																			
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				1 Objek	1 Objek	75.169.000,00	75.169.000,00	70.024.000,00	-5.145.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan konduktivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat 5. Peningkatan konduktivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat			28.537.000,00	DINAS PARIWisATA DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.02.2.01.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																			
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				100 Orang	100 Orang	84.908.000,00	84.908.000,00	69.018.000,00	-15.890.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan konduktivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat 5. Peningkatan konduktivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat			37.908.000,00	DINAS PARIWisATA DAN KEBUDAYAAN	

	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kegiatan pelestarian kesenian tradisional				100 %	100 %	1.577.311.000,00	1.577.311.000,00	2.993.711.100,00	1.416.400.100,00			-	5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat 5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	Organisasi Kesenian, PKK, Karangtaruna, Sekolah		762.311.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				4 Objek	4 Objek	1.421.716.000,00	1.421.716.000,00	2.858.901.100,00	1.437.185.100,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat 5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat			606.716.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				2 Laporan	2 Laporan	155.595.000,00	155.595.000,00	134.810.000,00	-20.785.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat 5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat			155.595.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan				30,77 %	30,77 %	172.500.000,00	172.500.000,00	157.594.000,00	0,00							172.500.000,00	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Prosentase cagar budaya yang dilestarikan				34 %	34 %	172.500.000,00	172.500.000,00	157.594.000,00	-14.906.000,00			-	5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat 5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat	-		172.500.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN

2.22.05.2.02.000		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				10 Objek	10 Objek	82.000.000,00	82.000.000,00	70.980.000,00	-11.020.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	-	5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat 5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat			82.000.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.05.2.02.000		Pengembangan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				1 Objek	1 Objek	90.500.000,00	90.500.000,00	86.614.000,00	-3.886.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	-	5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat 5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat			90.500.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							33.061.521.331,00	13.528.000.000,00	13.641.959.806,00	-19.419.561.525,00							9.118.761.331,00	
3.26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							33.061.521.331,00	13.528.000.000,00	13.641.959.806,00	-19.419.561.525,00							9.118.761.331,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	7.019.806.331,00	7.237.099.000,00	6.788.116.806,00	-230.386.000,00							6.789.420.331,00	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun				6 dokumen	6 dokumen	96.632.000,00	69.666.000,00	56.503.806,00	-40.128.194,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Aparatur/pemangku kepentingan, stakeholder		56.246.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN

56 | Rencana Kerja Disparbud Kab. Kebumen Tahun 2025

2.22.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	199.217.000,00	199.217.000,00	326.496.000,00	127.279.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			199.217.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan diklat dalam 1 tahun				1 kali	1 kali	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Aparatur		35.000.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.05.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				70 Orang	70 Orang	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			35.000.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.05.001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1500 Orang	1500 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			0,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN

2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	261.200.000,00	166.692.000,00	131.173.000,00	-130.027.000,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Disparbud, Obyek wisata		236.200.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.400.000,00	33.400.000,00	30.060.000,00	-3.340.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			33.400.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	51.300.000,00	26.950.000,00	24.255.000,00	-27.045.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			51.300.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.06.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	31.500.000,00	28.350.000,00	-16.650.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			50.000.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN

2.22.01.2.06.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas		3.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.06.000	Penyediaan Bahan/Material																	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	23.342.000,00	21.008.000,00	-28.992.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				63 Laporan	63 Laporan	78.000.000,00	48.000.000,00	24.000.000,00	-54.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas		48.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				33 unit	33 unit	215.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	-110.000.000,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas		165.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

	2.22.01.2.07.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			15.000.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	190.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			150.000.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan	12 bulan	332.000.000,00	330.392.000,00	289.416.000,00	-42.584.000,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Aparatur		332.000.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			2.000.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN

2.22.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	260.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	28.392.000,00	27.416.000,00	-2.584.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				49 unit	49 unit	276.400.000,00	146.307.000,00	206.307.000,00	-70.093.000,00			-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Kantor Disparbud, obyek wisata		191.400.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				38 Unit	38 Unit	160.000.000,00	99.907.000,00	139.907.000,00	-20.093.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

2.22.01.2.09.000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			4.200.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			18.200.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.01.2.09.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	94.000.000,00	24.000.000,00	44.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas			24.000.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
2. 3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata				88,39 %	88,39 %	23.438.668.000,00	4.213.700.000,00	4.031.383.000,00	-21.985.742.000,00							1.452.926.000,00	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	77.847.000,00	77.847.000,00	87.611.000,00	9.764.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	Pelaku Wisata		77.847.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN

	3.26.02.2.02.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					250 Orang	250 Orang	77.847.000,00	77.847.000,00	87.611.000,00	9.764.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif			77.847.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana destinasi pariwisata yang dikelola				9 unit	9 unit	23.306.454.000,00	4.081.486.000,00	3.902.933.000,00	-19.403.521.000,00			-	3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	wisatawan, obyek wisata		1.320.712.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.000	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	88.081.000,00	88.081.000,00	77.031.000,00	-11.050.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat			88.081.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				9 Unit	9 Unit	20.351.965.000,00	1.126.997.000,00	1.076.136.000,00	-19.275.829.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat			351.965.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	2.866.408.000,00	2.866.408.000,00	2.749.766.000,00	-116.642.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat			880.666.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Jumlah TDUP yang diterbitkan terhadap TDUP yg diajukan				100 %	100 %	54.367.000,00	54.367.000,00	40.839.000,00	-13.528.000,00			-	3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	usaha jasa pariwisata, pelaku jasa pariwisata		54.367.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.04.001	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				1 Laporan	1 Laporan	13.851.000,00	13.851.000,00	10.018.000,00	-3.833.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat			13.851.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.04.001	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota				1 Laporan	1 Laporan	40.516.000,00	40.516.000,00	30.821.000,00	-9.695.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat			40.516.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan				33 %	33 %	2.529.595.000,00	2.003.749.000,00	2.563.603.000,00	-1.726.632.000,00							802.963.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara				1500225 orang	1500225 orang	2.529.595.000,00	2.003.749.000,00	2.563.603.000,00	34.008.000,00			-	3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	wisatawan, pelaku wisata		802.963.000,00	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN

[illegible]

BAB V PENUTUP

A. Catatan Penting

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen didasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2021–2026. Dokumen ini berfokus pada program dan kegiatan tahun 2025 yang mengutamakan hasil, dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kondisi terkini. Tujuan utama adalah mengantisipasi peningkatan pelayanan dan fasilitasi di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Catatan penting yang harus diperhatikan antara lain:

- Keselarasan dengan Prioritas Daerah: Program harus mendukung visi-misi pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata dan kebudayaan sebagai penggerak ekonomi lokal.
- Penyesuaian Kebijakan Pusat dan Provinsi: Memperhatikan arahan pengembangan destinasi wisata unggulan, pelestarian budaya, dan ekonomi kreatif agar mudah mendapatkan dukungan.
- Ketersediaan Anggaran dan Prioritas Pembiayaan: Anggaran dialokasikan pada program strategis dan mendesak dengan prinsip efisiensi.
- Pengembangan Destinasi Wisata Berkelanjutan: Mengutamakan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.
- Pelestarian dan Promosi Kebudayaan Lokal: Revitalisasi seni tradisional dan promosi melalui media digital dan kerja sama swasta.
- Kemitraan dengan Swasta dan Masyarakat: Membangun sinergi untuk memperkuat investasi dan pelestarian budaya.
- Evaluasi dan Monitoring Berkala: Menjamin program berjalan sesuai rencana dan anggaran digunakan tepat sasaran.
- Pengembangan SDM: Pelatihan bagi pelaku pariwisata dan kebudayaan untuk meningkatkan kualitas layanan.
- Penggunaan Teknologi dan Promosi Digital: Memanfaatkan platform digital untuk jangkauan dan kemudahan informasi wisata.

B. Kaidah Pelaksanaan

Agar proses penyusunan dan pelaksanaan Renja berjalan efektif, perlu dipatuhi kaidah berikut:

- Kepatuhan terhadap Peraturan dan Kebijakan: Sesuai UU dan regulasi terkait pembangunan dan sektor pariwisata.
- Keselarasan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya: Mendukung target RPJMD dan Renstra dinas terkait.
- Partisipasi dan Kolaborasi: Melibatkan pemangku kepentingan dari pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi.

- Berbasis Data dan Analisis Kebutuhan: Menggunakan data valid sebagai dasar perencanaan.
- Prinsip Efisiensi dan Efektivitas: Memastikan setiap program berdampak nyata dan sesuai kapasitas anggaran.
- Keberlanjutan Program: Memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka panjang.
- Akuntabilitas dan Transparansi: Laporan terbuka dan pertanggungjawaban yang jelas.
- Fleksibilitas dan Adaptasi: Mampu menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan kebijakan.
- Penguatan SDM dan Teknologi: Fokus pada kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi.
- Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Indikator kinerja dan evaluasi rutin untuk perbaikan program.

C. Rencana Tindak Lanjut

Untuk menjamin implementasi Perubahan Renja 2025 berjalan optimal, langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan meliputi:

- Penetapan Prioritas Program: Menyusun dan mengalokasikan anggaran pada program prioritas berdasarkan analisis kebutuhan dan potensi daerah.
- Koordinasi dan Kolaborasi: Memperkuat koordinasi internal dan kemitraan eksternal dengan swasta dan masyarakat.
- Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas: Pembangunan dan perbaikan infrastruktur wisata sesuai standar kualitas dan keamanan.
- Pelestarian dan Pengembangan Budaya: Program revitalisasi seni, edukasi masyarakat, dan pelestarian nilai budaya.
- Promosi dan Pemasaran: Strategi promosi digital dan penyelenggaraan event budaya untuk menarik wisatawan.
- Pengembangan SDM: Pelatihan dan peningkatan kualitas profesionalisme pelaku pariwisata dan kebudayaan.
- Monitoring dan Evaluasi: Menetapkan indikator kinerja dan melakukan evaluasi berkala untuk penyesuaian program.
- Pelaporan dan Transparansi: Menyusun laporan kinerja yang terbuka dan akuntabel.

Dengan pelaksanaan tindak lanjut ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen diharapkan mampu mencapai target Perubahan Renja 2025 dan mendorong pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kebumen, 26 Juni 2025
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. FRANS HAIDAR MPA
Pembina Utama Muda
NIP.196812291990091001

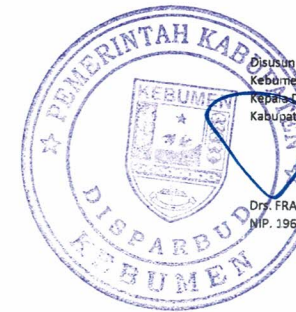
LAMPIRAN - LAMPIRAN

FORMULIR E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:																								
No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK																						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			8.902.350.000		4.003.217.965		1.792.026.000		54.453.390		345.443.585						399.896.975		4.403.114.940			
		Meningkatnya pelestarian budaya																						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kesenian yang Dikembangkan	53,13	7.366.000.000	41,26	2.533.074.055	46,88	1.634.432.000	12,7	54.312.390	15,87	275.160.485					28,57	329.472.875	69,83	2.862.546.930	131,43	38,86	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kegiatan pengembangan kebudayaan Kebumen	65	1.020.000.000	52,67	116.260.250	65	138.742.000	0	13.522.000	39,11	46.714.000					39,11	60.236.000	74,25	176.496.250	114,24	17,3	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kegiatan pelestarian keserian tradisional	100	6.346.000.000	50	2.416.813.805	100	1.495.690.000	25	40.790.390	25	228.446.485					50	269.236.875	100	2.686.050.680	100	42,33	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	32,97	1.536.350.000	88,73	1.470.143.910	30,77	157.594.000	12,58	141.000	2,65	70.283.100					15,23	70.424.100	103,96	1.540.568.010	315,32	100,27	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Prosentase cagar budaya yang dilestarikan	39	1.536.350.000	88,73	1.470.143.910	34	157.594.000	7,95	141.000	2,65	70.283.100					10,6	70.424.100	11,95	1.540.568.010	30,63	100,27	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN																						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			68.381.119.000		15.259.900.920		12.996.966.806		2.107.335.202		2.503.842.026						4.611.177.228		19.871.078.148			
		Meningkatnya kontribusi pendapatan Pariwisata Terhadap																						
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata	90,26	25.050.379.000	1,46	6.546.329.085	88,39	3.988.252.000	86,86	397.558.979	0,36	826.436.049					0,36	1.223.995.028	0,36	7.770.324.113	0,4	31,02	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	2.023.313.000	1	1.125.188.670	1	60.980.000	0,25	5.478.375	0,25	9.220.474					0,5	14.698.849	1,5	1.139.887.519	150	56,34	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana destinasi pariwisata yang dikelola	45	22.336.874.000	9	5.368.545.465	9	3.886.433.000	2	384.661.704	3	806.622.575					5	1.191.284.279	14	6.559.829.744	31,11	29,37	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capalan Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capalan Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)		Tingkat Capalan Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah/ Penanggungjawab	
									I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Rekomendasi Jumlah TDUP yang diterbitkan terhadap TDUP yg diajukan	100	690.192.000	100	52.594.950	100	40.839.000	25	7.418.900	25	10.593.000					50	18.011.900	150	70.606.850	150	10,23	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	35	9.657.211.000	38,69	2.003.003.918	33	1.763.603.000		175.033.815	-63,02	156.920.730					-63,02	331.954.545	-162,88	2.334.958.463	-465,38	24,18	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungas wisatawan mancanegara dar Nusantara	#####	9.657.211.000	2.983.422	2.003.003.918	1.500.225	1.763.603.000	#####	175.033.815	731.315	156.920.730					1.103.369	331.954.545	4.086.791	2.334.958.463	58,37	24,18	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dibiha	20	530.915.000	20	73.179.942	20	58.857.000	5,33	4.718.866	6,67	7.499.250					6,67	12.218.116	6,67	85.398.058	33,35	16,09	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Elonomi Kreatif Tingkat Dasar	5	530.915.000	1	73.179.942	1	58.857.000	0,25	4.718.866	0,25	7.499.250					0,5	12.218.116	1,5	85.398.058	30	16,09	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	33.142.614.000	100	6.637.387.975	100	7.186.254.806	25	1.530.023.542	25	1.512.985.997					50	3.043.009.539	150	9.680.397.514	150	29,21	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan danevaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	30	345.702.000	6	81.120.300	6	56.503.806	2	7.445.900	2	15.860.905					4	23.306.805	10	104.427.105	33,33	30,21	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	60	27.521.456.000	12	5.452.732.200	12	6.418.069.000	3	1.433.309.645	3	1.320.509.857					6	2.753.819.502	18	8.206.551.702	30	29,82	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan diklat dalam 1 tahun	1	330.000.000	1	362.758.995	1			0		0								362.758.995	0	109,93	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	1.871.476.000	12	213.356.372	12	131.173.000	3	32.624.920	3	29.112.550					6	61.737.470	18	275.093.842	30	14,7	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	203	645.081.000	23	99.730.000	42	105.000.000	0	23	83.899.000					23	83.899.000	46	183.629.000	22,66	28,47	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	1.581.367.000	12	288.212.578	12	329.202.000	3	34.563.377	3	37.555.365				6	72.118.742	18	360.331.320	30	22,79	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273	847.532.000	56	139.477.530	56	146.307.000		22.079.700	27	26.048.320				27	48.128.020	83	187.605.550	30,4	22,14	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
Jumlah Total					77.283.469.000		19.263.118.885		14.788.992.806		2.161.788.592		2.849.285.611					5.011.074.203		24.274.193.088				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	43,09	33,88			80,58	31,41		



Disusun
 Kebumen, 26 Juni 2025
 Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 Kabupaten Kebumen
 Drs. FRANS HAIDAR, MPA.
 NIP. 19681229 199009 1001

PENUTUP

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sasaran program dan kegiatan Pembangunan di dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan sasaran yang tercantum dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, sehingga turut berkontribusi terhadap capaian sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta perkembangan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman operasional tahunan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai instrumen untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD

Penyusunan Perubahan Renja didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan.

Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

